

KEBIJAKAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM MEMBEKUKAN STATUS KEANGGOTAAN SURIAH

Oleh :

Ade Ruhanda

ade.ruhanda@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research describes the policy of the organization of Islamic conference revoke membership status in Syria. Organization of Islamic Conference is a non-military organization founded in rebates, Morocco on 25 September 1969, Syria is one of the member states of the organization of Islamic conference. conflict in Syria is a complex problem which is a violation of human rights, the number of casualties and the absence of security guarantees for the citizens.

The research method used is descriptive qualitative research method of the facts. This study is an explanation that describes the problem, indications, policies, and actions. In technical writing, the authors collected and compiled the data through the study of literature from multiple sources such as books, journals, articles, websites, and other media. The author also uses the concept to International organizations and the concept of international cooperation.

This research demonstrates a policy taken by the organization of Islamic conference on political conflict in Syria. in addition, the conflict has become a political discussion of most of the other members of the Organization of Islamic Conference. long span of time in syria conflict settlement solution without causing the organization of Islamic conference syria revoke membership status in 2012 based on the results of ministerial meetings and summits remarkable Organization of Islamic Conference which was held in Makkah Al-Mukaramah 14th in Saudi Arabia -15 August 2012.

Keywords: Policy, Conflict, Organization of Islamic Conference, Syria

Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan Organisasi Kerjasama Islam membekukan status keanggotaan Suriah. Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang mulai berkembang sejak berakhirnya Perang Teluk. Pengalaman sejarah Suriah yang pernah

dijajah oleh Kekaisaran Ottoman dari Turki selama hampir 400 tahun yaitu sejak 1517 hingga menjelang berakhirnya Perang Dunia I di tahun 1918.¹ Menurut pembukaan Undang Undang disebutkan bahwa Suriah adalah bagian dari bangsa

¹George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1992, hal 199.

Arab dan kawasannya disatukan dengan negara-negara Arab lain. Dengan demikian, ideologi bangsa Suriah adalah Pan Arabisme (persatuan Arab) dan nasionalisme Arab melalui Partai Baath sebagai Partai yang berkuasa dan Konstitusi Suriah pada tahun 1950² yang dikenalkan oleh Presiden Adib al Shiskali.

Upaya untuk mewujudkan solidaritas Arab yang lebih dikenal sebagai Pan-Arabisme selanjutnya diwujudkan dengan pendirian Partai Baath oleh Michael Aflaq (Kristen), Salah al Din Bitar (Muslim Sunni), dan Zaki al Arzuzi (Alawi) pada tahun 1943. Sejak awal berada dibawah kekuasaan Ottoman masalah yang dihadapi oleh penduduk Arab adalah persatuan karena wilayah Arab yang terbagi menjadi beberapa negara sehingga menyulitkan terwujudnya persatuan. Pada awalnya Suriah dianggap sebagai salah satu negara yang melatarbelakangi perdamaian di Timur Tengah, namun pada saat ini Suriah menjadi perhatian dunia Internasional dengan sejumlah konflik yang terjadi dalam negara Suriah itu sendiri.

Tingginya grafik konflik yang terjadi di Suriah menimbulkan asumsi bahwa yang dialami Irak pada saat ditinggal Saddam Hussein yaitu munculnya perpecahan sektarian dan etnik yang meluas di seluruh negeri yaitu antara Muslim Sunni dengan Syiah akan dialami Suriah sepeninggal Bashar al Assad dari Suriah, yaitu adanya perpecahan sektarian khususnya antara Muslim Sunni dengan Alawi, atau perpecahan afiliasi politik yang berdasarkan agama yang diwakili Ikhwanul Muslimin dengan yang

berhaluan Sosialis, dan kelompok Sekuler.³

Pada tahun 1960-an, sejarah negara Suriah dipenuhi dengan kasus- kasus kudeta dan kerusuhan. Aksi kudeta yang terjadi di Suriah dilakukan oleh Partai Baath yang dipimpin langsung oleh Michel Aflaq dan Salahuddin Al Bitar untuk menguasai pemerintahan pada tahun 1963.⁴ Salahuddin Al Bitar pernah di angkat menjadi perdana menteri namun pada tahun 1966 masa pemerintahannya berakhir karna adanya kudeta oleh anggota Partai Baath dari kalangan militer yaitu Jenderal Salah Jadid, pemerintahan Al Bitar di anggap kurang revolusioner dan kurang tegas dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Pada tahun 1967 di bawah pemerintahan Salah Jadid, Suriah mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Israel dalam bentuk Perang Enam hari. Pada perang tersebut pasukan negara- negara arab kalah dan Daratan Tinggi Golan milik Suriah diduduki oleh Israel sampai saat ini.⁵

Jika melihat kekalahan Suriah dalam perang dan adanya penarikan pasukan dari Jordan yang mana awalnya dikirim untuk membantu pejuang Palestina menimbulkan ketidakpuasan sebagian besar elite politik, sehingga pada tanggal 13 November 1970 pemerintahan Salah Jadid digulingkan oleh menteri pertahanannya sendiri yaitu Hafez Al Assad.⁶ Pada saat Partai Baath mulai berkuasa di Suriah, kelompok elite politik didominasi oleh orang- orang kalangan miskin dan minoritas, mereka mengadakan proyek industrialisasi dan modernisasi pertanian.

² Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (DJKPI). *Kerjasama Multilateral Oki. Diakses dari* <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=4&news_sub_category_id=69> pada tanggal 18 Februari 2014

³ <<http://ejournal.uajy.ac.id/4524/2/1HK10107.pdf>> (diakses 20 Juni 2014)

⁴ Dina Y. Sulaeman. 2013. *Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Depok: Pustaka IIMaN, hlm 16

⁵ Dina Y. Sulaeman. *Ibid*

⁶ Dina Y. Sulaeman. *Ibid*, hlm 17

Hafez Al Assad terpilih sebagai Presiden Suriah pada tahun 1971 melalui sebuah referendum menggantikan Salah Jadid. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya Suriah memiliki presiden dari kalangan Alawy. Selama masa pemerintahan Hafez Al Assad selalu berusaha melindungi diri dengan mempertahankan rezim dengan menguasai militer. Keluarga Al Assad berasal dari etnis minoritas Alawy, namun disisi lain kaum Alawy menguasai militer Suriah secara keseluruhan yang mana mencapai 200.000 tentara Suriah.⁷

Berbagai upaya dilakukan agar adanya pengakuan dari pemerintah Suriah bahwa kaum Alawy merupakan bagian dari muslim. Namun, sejak Hafez Al Assad resmi sebagai Presiden Suriah, tuduhan terhadap kaum Alawy bukan bagian dari muslim muncul kembali dengan adanya upaya kudeta kelompok Ikhwanul Muslimin pada tahun 1982.⁸ Setelah masa pemerintahan Hafez Al Assad, Suriah dipimpin oleh Bashar Al Assad yang merupakan anak dari Hafez Al Assad dan meneruskan kekuasaannya selama empat puluh tahun.

Pada tanggal 26 Januari 2011 muncul demonstrasi publik Suriah yang berkembang menjadi pemberontakan nasional, sebagian besar masyarakat menuntut agar Presiden Bashar Al Assad mengundurkan diri sebagai Presiden Suriah yang telah berkuasa hampir lima dekade pemerintahan sejak masa pemerintahan Hafez Al Asaad.⁹ Selain itu pada bulan Maret 2011 bersamaan dengan adanya gelombang pemberontakan di negara Arab, aksi demo juga terjadi di Suriah, masyarakat menuntut berbagai hal

diantaranya reformasi, dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berbicara dan perbaikan ekonomi.

Berbagai cara telah banyak dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi bahkan negara-negara serta organisasi-organisasi internasional juga memberikan perhatian. Salah satu Organisasi Internasional yang ikut andil dalam konflik yang terjadi di Suriah adalah Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi ini merupakan Organisasi islam yang peduli terhadap warga muslim Suriah sehingga Organisasi Kerjasama Islam merasa perlu untuk ikut andil dalam permasalahan yang terjadi di Suriah tersebut.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Maroko pada tanggal 25 September 1969 yang di latar belakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds tanggal 21 Agustus 1969.¹⁰ Pembakaran Masjid Al Aqsha menimbulkan reaksi dari kalangan umat Islam di dunia, adanya keinginan untuk membentuk kekuatan dunia Islam dalam rangka melakukan pembebasan terhadap kota Al Quds. Berdasarkan kesepakatan dari Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko bersama Panitia Persiapan diantaranya Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko maka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam dimulai dari tanggal 22 – 25 September 1969 di Rabat.¹¹

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati, negara-negara anggota dalam

⁷ *Ibid.*,

⁸ Dina Y. Sulaeman. *Ibid*, hlm 20

⁹ <<http://ejournal.uajy.ac.id/4524/2/1HK10107.pdf>> (diakses 20 Juni 2014)

¹⁰ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (DJKPI). *Kerjasama Multilateral Organisasi Kerjasama Islam*.

<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=4&news_sub_category_id=69> (Diakses 24 Juni 2014)

¹¹ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (DJKPI). *Ibid.*,

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) membentuk sebuah prinsip diantaranya yaitu persamaan antara negara-negara anggota, menghormati hak dalam menentukan keputusan masing-masing, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain, menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrase, dan abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara.

Landasan Teori

Penelitian ini membutuhkan suatu kerangka acuan untuk menjelaskan kebijakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam membekukan status keanggotaan Suriah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori untuk memudahkan penulis dalam menganalisa peristiwa yang terjadi, yaitu:

Teori Organisasi Internasional

Berdasarkan peristiwa yang di ambil, organisasi internasional adalah bagian terpenting, selain itu penulis juga menggunakan konsep *responsibility to protect* untuk mendukung teori Organisasi Internasional. Menurut Jack C plano, organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal yang melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, social serta bidang lainnya.¹²

Dari pengertian tersebut dapat di ketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara bahkan memiliki peran yang penting untuk mencapai kepentingan nasional suatu Negara. Hal ini sesuai bahwa OKI yang merupakan organisasi internasional telah berperan dalam mengupayakan perdamaian di Suriah dengan kebijakan yang di ambil oleh OKI melalui Konferensi Tingkat Tinggi yang di hadiri oleh Negara- Negara anggota OKI.

Responsibility to protect adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep ini menyatakan bahwa setiap Negara memiliki kewajiban dalam melindungi rakyatnya dari empat kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga bertanggung jawab untuk membantu Negara- Negara dalam memenuhi tugasnya tersebut.

Peran organisasi internasional bagi suatu Negara baik pada saat kritis maupun sangat membangun adalah untuk emningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain. Selain itu fungsi organisasi internasional dalam bidang keamanan yaitu menciptakan perdamaian antar Negara anggota, seperti menghidarkan suatu konflik atau perang dan mendukung kerjasama antar Negara anggota, baik Negara dengan Negara, pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial dan keamanan.

Pada kasus terjadinya bencana kemanusiaan, baik dalam situasi sengketa sipil ataupun ketika sebuah pemerintahan secara sistematis dan terus menerus melanggar HAM yang dimiliki warga negaranya maka intervensi asing merupakan salah satu instrument paling

¹² Plano, Jack C, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin. 1986. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali, hlm 271

penting yang dapat digunakan dalam menghentikan peristiwa tersebut.

Teori Kerjasama Internasional

Pada dasarnya setiap negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri, perlunya kerjasama dengan negara lain serta saling ketergantungan sesuai kebutuhan negara masing-masing. Bentuk kerjasama dapat berupa kerjasama ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan yang dapat dijalin dengan satu negara atau lebih. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat berupa hubungan ekspor-impor, investasi dan pemberian bantuan baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman luar negeri. Kerjasama dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah didalam sebuah negara. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama dapat terbentuk dari keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang berkembang.

K.J Holsti menyatakan transaksi dan interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Pada dasarnya kerjasama internasional bukan hanya dilakukan oleh Negara secara individual tetapi juga dilakukan oleh negara dalam lingkup organisasi atau lembaga internasional.

Peran Organisasi Kerjasama Islam dalam Mengatasi Krisis Dunia Islam

Konflik Suriah merupakan permasalahan yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan dengan adanya sejumlah peristiwa-peristiwa kekerasan yang banyak menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi negara Suriah itu sendiri, baik secara fisik maupun material. Salah satu penyebab dari awalnya peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Suriah dikarenakan Pada masa pemerintahan Bashar Al Assad pertumbuhan penduduk meningkat secara drastis sehingga menimbulkan berbagai

masalah, seperti kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di daerah Damaskus dan Aleppo, namun penduduk yang tinggal di daerah desa di Suriah mempunyai tingkat perekonomian yang tidak baik dan anak-anak juga tidak dapat bersekolah, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tingkat perekonomian di Suriah pada masa Bashar Al Assad tidak merata. Pembangunan sosial dan ekonomi Suriah masih jauh dari memuaskan.

Organisasi Kerjasama Islam merupakan mewakili sekitar satu setengah miliar muslim di seluruh dunia dan menjadi organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Organisasi Kerjasama Islam memiliki potensi yang sangat besar bagi penyelesaian krisis yang menimpa negara-negara Islam terutama menghadapi rezim Zionis. Konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam dengan partisipasi kepala negara dari 57 negara Islam berlangsung di Kairo pada tanggal 6-7 Februari 2013 di Hotel Fairmont Towers, Heliopolis.¹³ Pertemuan penting dunia Islam ini menjadi istimewa karena berlangsung di saat Mesir memperingati tahun kedua kemenangan revolusi rakyat yang berhasil menjatuhkan rezim pro Barat. Negara kedua di kawasan Afrika Utara setelah Tunisia tersebut dilanda kebangkitan Islam yang berhasil menjatuhkan rezim despotik Mubarak yang menjadi sekutu Amerika Serikat dan rezim Zionis.

Berdasarkan pasal 2 dalam Piagam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dan penjajahan terhadap hak-hak manusia merupakan hal yang harus di junjung tinggi. Pada salah satu tujuan

¹³ Peran Oki Atasi Krisis Dunia Islam, 12 februari 2013 <http://indonesian.tribune.com/asset_publisher/k0Z8/content/peran-oki-atasi-krisis-dunia-islam> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2014)

pembentukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) digambarkan bahwa pada dasarnya Organisasi Kerjasama Islam menginginkan segala bentuk penjajahan dan kolonial yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah atau sebuah negara harus dihapuskan, selanjutnya pembentukan Organisasi Kerjasama Islam mengupayakan agar segregasi, rasial, diskriminasi dan kolonialisasi dihapuskan dalam segala bentuk.

Selain itu, menurut Organisasi Kerjasama Islam menghargai hak dalam penentuan nasib sendiri dan tidak terinterferensi oleh hal-hal dalam negeri tiap anggota adalah penting. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan mendapat perlakuan yang sama dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kasus yang terjadi di Suriah yang mana banyak terjadi kekerasan terhadap masyarakat baik warga sipil, anak-anak maupun perempuan, Organisasi Kerjasama Islam memandang bahwa banyak pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia. Seperti yang di sebutkan sebelumnya, konflik yang terjadi di Suriah menjadi konflik bersenjata internal di Suriah, dengan banyaknya aksi pemberontakan yang terjadi antara pemerintah Suriah dan penduduk menimbulkan aksi perlawanan dari masyarakat. Aksi perlawanan dari rakyat di Suriah terdiri dari berbagai bentuk mulai dari secara individu sampai bentuk perlawanan secara kelompok. Namun disisi lain jika melihat hasil akhir dari pertempuran antara pemerintah dengan rakyat Suriah yang didominasi oleh kemenangan dari pihak pemerintah, hal ini menyebabkan rakyat Suriah merasa perlu untuk membentuk suatu kekuatan oposisi yang mampu memberikan kekuatan dalam aksi perlawanan.

Berdasarkan prinsip pembentukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di sebutkan bahwa Organisasi Kerjasama Islam mengupayakan menyelesaikan setiap konflik dengan cara damai, seperti

negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan arbiterasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap Suriah yang merupakan anggota dari Organisasi Kerjasama Islam.

Organisasi ini merupakan Organisasi Islam yang peduli terhadap warga muslim Suriah sehingga Organisasi Kerjasama Islam merasa perlu untuk ikut andil dalam permasalahan yang terjadi di Suriah. Melalui salah satu badan utama dalam struktur Organisasi Kerjasama Islam yaitu Konferensi Raja dan Kepala Negara, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 12 dalam rangka membahas kasus yang terjadi di Suriah.

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam yang ke 12 dilaksanakan di Hotel Fairmont Towers, Heliopolis di Kairo, Mesir pada tanggal 6-7 Februari 2013. Konferensi ini dihadiri oleh 57 negara Islam yang merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam. Pada KTT Organisasi Kerjasama Islam ke 12, Senegal menyerahkan kepemimpinan organisasi Negara-negara Islam selama tiga tahun pada Mesir, Presiden Mohammad Mursi dari Mesir dan Presiden Senegal Macky Sall selaku ketua KTT-11 secara resmi membuka konferensi yang diadakan di Kairo melalui pidato sambutan yang menyatakan bahwa dunia Islam saat ini sedang menghadapi banyak tantangan global sehingga Organisasi Kerjasama Islam dianggap dapat memperkuat kerjasama diantara negara-negara Islam sekaligus untuk menyelesaikan konflik regional dan global.

Konferensi ini membahas isu-isu yang sedang terjadi khususnya di Negara Islam, kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi tersebut mencakup 170 poin yang mana fokus pada permasalahan yang sedang terjadi di Suriah dan Palestina. Hasil dari KTT Organisasi Kerjasama Islam ke-12 diharapkan dapat membentuk

suatu gerakan kebangkitan Islam akibat intervensi negara asing. Pada konferensi ini, Iran mengusulkan adanya penolakan intervensi asing dalam penyelesaian krisis Suriah yang menjadi perhatian banyak pihak dan dimasukkan dalam kesepakatan bersama KTT Organisasi Kerjasama Islam ke-12. Organisasi Kerjasama Islam memberikan respon positif terhadap proposal komisi segi empat yang terdiri dari Mesir, Iran, Arab Saudi dan Turki terkait penyelesaian krisis Suriah.

Kebijakan Organisasi Kerjasama Islam membekukan Status Keanggotaan Suriah

Tingginya jumlah korban dari konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah menyebabkan Suriah mendapatkan kecaman dari berbagai negara diantaranya Negara-negara Barat dan Arab menuntut pertanggungjawaban rezim Presiden Bashar Al Assad atas konflik yang terjadi di Suriah.¹⁴

konflik yang terjadi di Suriah sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari jumlah korban yang tidak sedikit baik dilihat dari pihak pemerintah maupun dari warga sipil yang mendominasi banyaknya jumlah korban. Berdasarkan Organisasi pemantau HAM Suriah, *Syrian Observatory for Human Rights* mencatat bahwa hampir setengah total jumlah korban merupakan warga sipil. Organisasi pemantau mencatat bahwa konflik yang terjadi di Suriah mencapai 82.275 orang. Dari banyaknya korban tersebut, korban yang merupakan warga sipil berjumlah 26.636 orang, 4.788 anak-anak dan 3.409 perempuan di dalamnya.¹⁵

¹⁴ <<http://e-journal.uajy.ac.id/4524/2/1HK10107.pdf>> (diakses 20 Juni 2014)

¹⁵ Novi Christiastuti Adiputri. "2 Tahun Konflik Suriah, Lebih dari 80 Ribu Orang Tewas" diakses dari

<<http://news.detik.com/read/2013/05/13/130335/2244115/1148/2-tahun-konflik-suriah-lebih->

Selain itu, jumlah korban dari anggota pemberontak, termasuk militer yang menyimpang adalah 16.687 orang, korban tanpa identitas berjumlah 2.368 orang, sedangkan dari pihak tentara Suriah tercatat lebih dari 16.729 dan 12.000 orang anggota Shabiha atau milisi pro-rezim Presiden Bashar al-Assad yang mendominasi pemerintah, pasukan keamanan dan militer.

Berdasarkan serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Suriah, Organisasi Kerjasama Islam yang merupakan Organisasi Internasional juga mengambil kebijakan tersendiri untuk memberikan desakan terhadap penyelesaian konflik internal yang terjadi di Suriah. Hal ini dapat dilihat dari desakan-desakan yang dilakukan Organisasi Kerjasama Islam sebagai wujud kepedulian terhadap negara anggotanya yaitu Suriah. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan Organisasi Kerjasama Islam yaitu, Organisasi Kerjasama Islam membekukan status keanggotaan Suriah.¹⁶

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa tingkat Menlu Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Arab Saudi pada tanggal 14 Agustus 2012, Organisasi Kerjasama Islam mengeluarkan pernyataan yang telah disepakati bersama untuk membekukan status keanggotaan Suriah terkait situasi konflik yang sedang terjadi di negara tersebut. Namun, dalam Konferensi Tingkat Tinggi luar biasa tingkat Menlu tersebut, Republik Islam Iran dan Aljazair menolak keputusan tersebut yang menyatakan pembekuan status keanggotaan Suriah. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi luar biasa tingkat Menlu tersebut, Organisasi Kerjasama Islam menyebutkan bahwa dunia muslim tidak bisa lagi menerima

dari-80-ribu-orang-tewas> (Diakses 22 Juni 2014)

¹⁶ <<http://www.suarapembaruan.com/home/marty-oki-bekukan-keanggotaan-suriah/23543>> (Diakses pada tanggal 26 Juni 2014)

Rezim yang membantai rakyatnya sendiri dan dalam akhir Konferensi Tingkat Tinggi tersebut, negara-negara anggota Kerjasama Islam setuju atas pentingnya segera mengakhiri aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Suriah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kerjasama Islam merupakan respon terhadap konflik yang terjadi di Suriah. Dalam beberapa respon yang dilakukan Organisasi Kerjasama Islam ini, ternyata belum dapat menghentikan konflik yang terjadi di Suriah. Kebijakan yang dikeluarkan Organisasi Kerjasama Islam untuk membekukan status keanggotaan Suriah, dimaksudkan sebagai bentuk upaya dalam menekan Suriah untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi. Hal ini dapat di maklumi bahwa Organisasi Kerjasama Islam tidak secara langsung ikut menjadi penengah terhadap konflik yang terjadi yang di mungkinkan campur tangan negara- negara lain yang ikut andil sepanjang konflik yang terjadi di Suriah.

Jadi, upaya-upaya yang dilakukan Organisasi Kerjasama Islam untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah ini tidak akan menimbulkan efek jera seperti yang diharapkan Organisasi Kerjasama itu sendiri, dan juga tidak akan mampu menekan tingkat konflik yang terjadi seperti yang di maksudkan Organisasi Kerjasama Islam itu sendiri dalam membekukan status keanggotaan Suriah dalam Organisasi tersebut.

Respon Suriah Terkait Kebijakan Organisasi Kerjasama Islam

Kebijakan Organisasi Kerjasama Islam dalam membekukan status keanggotaan Suriah juga menimbulkan respon dari Suriah sendiri. Hal ini memberikan pandangan baru terkait isu konflik yang terjadi di Suriah bahwa menurut Suriah, kebijakan tersebut hanya alat dan sebagai bentuk persengkokolan

antara Konferensi Kerjasama Islam dan Amerika Serikat yang di ketahui sebagai pelopor terhadap konspirasi yang terjadi di Suriah dan Suriah menyatakan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Suriah.¹⁷

Respon yang ditunjukkan Suriah ini sesuai dengan pernyataan Al-Moallem yang merupakan Menteri Luar Negeri Suriah dalam wawancaranya dengan televisi pemerintah yang menganggap bahwa kebijakan yang diambil Konferensi Kerjasama Islam sebagai pelanggaran terhadap piagam organisasi tersebut serta megatakan bahwa beberapa negara anggota Organisasi kerjasama Islam adalah munafik karena negara-negara peserta sidang Konferensi Tingkat Tinggi luar biasa membekukan status keanggotaan Suriah disaat beberapa negara anggota lainnya menolak kebijakan yang di ambil Konferensi Kerjasama Islam tersebut seperti Republik Islam Iran dan Aljazair.¹⁸

Penolakan yang dinyatakan Iran disampaikan oleh Ali Akbar Salehi yang merupakan Menteri Luar Negeri Iran bahwa dengan membekukan status keanggotaan Suriah bekan berarti Konferensi Kerjasama Islam telah bergerak ke arah penyelesaian konflik yang terjadi di Suriah dan kebijakan yang diambil dalam membekukan status keanggotaan Suriah merupakan upaya untuk menghapus isu bukan menyelesaikan konflik tersebut.¹⁹

¹⁷ Reaksi Suriah Atas Keputusan Sidang Mekah, 19 Agustus 2012

< <http://theglobal-review.com/.U8aq0qtfrDc>> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2014)

¹⁸ Reaksi Suriah Atas Keputusan Sidang Mekah, *ibid*

¹⁹ Reaksi Suriah Atas Keputusan Sidang Mekah, 19 Agustus 2012

< <http://theglobal-review.com/.U8aq0qtfrDc>> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2014)

Respon yang dilakukan Suriah juga tidak berhenti sampai disitu. Suriah juga mengatakan kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan yang tidak rasional yang dilakukan Konferensi Kerjasama Islam sebagai front terdepan dalam muqawama anti Israel. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa kebijakan yang diambil Konferensi Kerjasama Islam ini sebuah konspirasi untuk menekan lebih berat pemerintah Suriah dan kepala dari konspirasi ini tidak diragukan lagi adalah Amerika Serikat yang menyaksikan Israel semakin terkucil karena gelombang Kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara.²⁰

Dampak Status Keanggotaan Suriah Dibekukan Konferensi Kerjasama Islam

Konflik yang terjadi di Suriah tidak dapat dengan mudah disamakan dengan konflik-konflik yang terjadi di negara-negara lain seperti di Tunisia, Mesir dan Libya. Hal ini disebabkan oleh krisis Suriah yang tidak hanya memberi dampak terhadap keadaan di dalam negeri Suriah itu sendiri, melainkan juga berdampak dan berpengaruh terhadap kepentingan regionalnya seperti hubungan dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. bahkan kepentingan global, terutama dengan adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang akan menyerang Suriah. Banyak pihak bahkan khawatir bahwa krisis Suriah dapat menjadi awal mula perang Perang Dunia III karena melibatkan banyak kepentingan.²¹

²⁰ Reaksi Suriah Atas Keputusan Sidang Mekah, *Ibid*

²¹ Anggi Tangkas Wibowo. *Seminar Intern: Konflik Suriah: Masalah Keamanan Internasional dan optimalisasi Peran Indonesia*. <
<http://www.politik.lipi.go.id/in/kegiatan/886-seminar-intern-konflik-suriah-masalah-keamanan-internasional-dan-optimalisasi-peran-indonesia.html>> (Diakses 28 Juni 2014)

Dampak yang berpengaruh terhadap kepentingan regionalnya seperti hubungan dengan Organisasi Kerjasama Islam yang terganggu, Organisasi Kerjasama Islam mengambil kebijakan membekukan status keanggotaan Suriah sehingga berdampak pada Suriah yang dibawah rezim Bashar Al-Assad semakin dijauhi negara-negara tetangga. Setelah menerima sejumlah sanksi internasional dan diasingkan dari pergaulan di Liga Arab, rezim Assad kini dikucilkan oleh sesama negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam.²²

Selain itu, kebijakan yang diambil Organisasi Kerjasama Islam dalam membekukan status keanggotaan Suriah juga menekankan meningkatnya isolasi internasional atas rezim Bashar Al-Assad dan meluasnya dukungan untuk rakyat Suriah dan perjuangan mereka untuk negara demokrasi yang mencerminkan aspirasi mereka dan menghormati HAM mereka. Hal ini tentu saja menjadikan perjuangan rakyat yang berkonflik dengan pemerintah akan semakin gencar melakukan perlawanan karena dianggap bahwa masyarakat internasional ikut mendukung perjuangan mereka untuk menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad yang diketahui sebagai Otoriter.

Disisi lain, dengan dibekukannya status keanggotaan Suriah oleh Konferensi Kerjasama Islam, tentu saja Suriah tidak mendapatkan dukungan hukum dari negara anggota Organisasi Kerjasama Islam lainnya atas pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik Suriah

²² Renne R.A Kawilarang. *Negara-negara Islam Kucilkan Rezim Assad*. <
http://fokus.news.viva.co.id/print_detail/printing/344662-negara-negara-islam-kucilkan-rezim-assad> (Diakses 28 Juni 2014)

KESIMPULAN

Pada dasarnya konflik yang terjadi di Suriah merupakan gerakan demokrasi, gerakan rakyat secara damai berawal dari kota Deera. Namun pada kenyataannya respon yang diberikan pemerintah dalam bentuk kekuatan militer menyebabkan munculnya gerakan perlawanan sejak bulan Maret 2011. Gerakan Perlawanan yang terjadi antara Pemerintah dan rakyat terdiri dari gerakan protes yang diberi nama *Day of Dignity* di Damaskus yang menyebabkan 35 orang ditahan pada tanggal 16 Maret 2011, di Deera sebuah kota perbatasan Yordania aparat keamanan melakukan aksi penembakan terhadap sejumlah demonstran.²³

Menurut *International Committee of Red Cross* (ICRC), konflik berdarah yang terjadi di Suriah digolongkan dalam kategori perang saudara. Pada tanggal 15 Juli 2012 salah seorang juru bicara *International Committee of Red Cross* (ICRC), Hicham Hassan menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional yang nantinya akan menimbulkan implikasi adanya tuntutan kejahatan perang pada pihak-pihak yang terlibat dalam perang tersebut.

Berdasarkan pasal 2 dalam Piagam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dan penjajahan terhadap hak-hak manusia merupakan hal yang harus di junjung tinggi. Pada salah satu tujuan pembentukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) digambarkan bahwa pada dasarnya Organisasi Kerjasama Islam menginginkan segala bentuk penjajahan dan kolonial yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah atau sebuah negara harus dihapuskan, selanjutnya pembentukan Organisasi Kerjasama Islam mengupayakan agar segrenasi,

rasial, diskriminasi dan kolonialisasi dihapuskan dalam segala bentuk.

Organisasi Kerjasama Islam ini merupakan Organisasi Islam yang peduli terhadap warga muslim Suriah sehingga Organisasi Kerjasama Islam merasa perlu untuk ikut andil dalam permasalahan yang terjadi di Suriah. Melalui salah satu badan utama dalam struktur Organisasi Kerjasama Islam yaitu Konferensi Raja dan kepala Negara, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 12 dalam rangka membahas kasus yang terjadi di Suriah. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa tingkat Menlu Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Arab Saudi pada tanggal 14 Agustus 2012, Organisasi Kerjasama Islam mengeluarkan pernyataan yang telah di sepakati bersama untuk membekukan status keanggotaan Suriah terkait situasi konflik yang sedang terjadi di negara tersebut. Namun, dalam Konferensi Tingkat Tinggi luar biasa tingkat Menlu tersebut, Republik Islam Iran dan Aljazair menolak keputusan tersebut yang menyatakan pembekuan status keanggotaan Suriah.

Jadi, Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara bahkan memiliki peran yang penting untuk mencapai kepentingan nasional suatu Negara. Hal ini sesuai bahwa OKI yang merupakan organisasi internasional telah berperan dalam mengupayakan perdamaian di Suriah dengan kebijakan yang di ambil oleh OKI melalui Konferensi Tingkat Tinggi yang di hadiri oleh Negara- Negara anggota OKI.

²³ Jurnal Masalah agama, budaya, sosial dan politik Timur Tengah. *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1992.

Dina Y. Sulaeman. *Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Depok: Pustaka IIMaN, 2013.

Plano, Jack C, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmad Yani,. *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Jurnal

Humphrey Wangke. Februari 2012. *Krisis Politik dan Konflik Kepentingan di Suriah*. Vol IV, No. 03

Jurnal masalah agama, budaya, sosial dan politik Timur Tengah. Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol. 5, No.1

Situs Internet

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (DJKPI). *Kerjasama Multilateral Oki*. Diakses dari <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=4&news_sub_category_id=69> pada tanggal 18 Februari 2014

<<http://e-journal.uajy.ac.id/4524/2/1HK10107.pdf>> (diakses 20 Juni 2014)

Peran Oki Atasi Krisis Dunia Islam, 12 februari 2013 <http://indonesian.tribe.com/telitik/-/asset_publisher/k0Z8/content/peran-okiatasi-krisis-dunia-islam> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2014)

Anggi Tangkas Wibowo. *Seminar Intern: Konflik Suriah: Masalah Keamanan Internasional dan optimalisasi Peran Indonesia*. <<http://www.politik.lipi.go.id/in/kegiatan/886-seminar-intern-konflik-suriah-masalah-keamanan-internasional-dan-optimalisasi-peran-indonesia.html>> (Diakses 28 Juni 2014)

Kerjasama Multilateral Organisasi Kerjasama Islam <ditjenkpi.kemendag.go.id/website.../OKI_-buku20060109121722.doc> (Diakses 24 Juni 2014)

Peran OKI Atasi Krisis Dunia Islam. <http://indonesian.tribe.com/telitik//asset_publisher/k0Z8/content/peran-okiatasi-krisis-dunia-islam> (Diakses 18 Februari 2014)